

KEBEBASAN PERS : RUANG GERAK ATAU IDEOLOGI* (Mau Kemana Perjalanan Kebudayaan Kita?)

Oleh Ashadi Siregar

Mengapa kebebasan pers ?

Topik kita kebebasan pers. Sudah banyak artikel ditulis, banyak buku yang membahas. Mau apa lagi? Masihkah soal kebebasan pers memiliki aktualitas? Tidakkah pembicaraan ini seolah mengunyah-ngunyah makanan basi? Biasanya hal kebebasan pers menjadi aktual jika ada institusi pers yang mengalami musibah. Saat ini dunia pers aman-aman saja. Lantas apa yang perlu dibicarakan? Andai pun dunia pers kita sedang sedih, tentunya tidak "bijaksana" membicarakannya di depan forum.

Tetapi saya percaya, bab kebebasan pers bukan sekadar urusan dunia pers. Ia dapat dijadikan jendela buat menatap sejumlah butiran yang dapat dipikirkan bersama. Setidak-tidaknya, menurut hemat saya, dari sini cukup kuat rangsangannya untuk mengajak kita berpikir mengenai fenomena yang ada di sekitar kita.

Kalau kebebasan pers dibicarakan semata-mata untuk melihat nasib institusi pers di Indonesia saat ini, memang ya, hanya mengunyah barang basi. Kita mungkin hanya akan terlibat dalam percakapan itu ke itu yang membuat kita menjadi bebal. Tetapi soal kebebasan pers ini dapat juga kita tempatkan sebagai urusan kita, bukan hanya urusan orang pers. Setidak-tidaknya melalui perbincangan ini kita dapat menjadikannya sebagai titik-tolak dalam melihat berbagai fenomena yang ada dalam masyarakat kita.

Dengan bahasa slogan, kebebasan pers biasanya disatu napaskan dengan tanggungjawab sosial. Dengan cara lain, kebebasan pers dapat dipandang dari ruang gerak yang tersedia untuk kehadiran institusi pers, dan kemampuan institusi pers untuk menjalankan fungsinya. Ruang gerak ini berkaitan dengan faktor-faktor di luar diri institusi pers, sedang kemampuan menjalankan fungsinya berkaitan dengan kapasitas personel yang menjalankan profesi pers. Di antara ruang gerak dan fungsi profesional pers ini, kita perlu pula mengamati realitas yang menjadi bahan baku institusi pers. Kehadiran pers ditandai melalui isi yang disajikannya. Betapapun tersedia ruang gerak dan kehandalan profesional pelakunya, tidak akan berarti kalau bahan baku dari kehidupan masyarakat tidak memadai untuk diangkat sebagai isi pers.

Selama ini perhatian ditumpukan untuk pengembangan profesi pers. Secara sederhana digunakan kerangka pemikiran, bahwa kebebasan pers dapat mewujudkan seiring dengan semakin berfungsi dan bertanggungjawabnya profesi pers. Mungkin nalar ini ada benarnya. Tetapi perlu disadari bahwa antara fungsi dan tanggungjawab itu sebenarnya bukanlah dua sisi pada satu mata koin. Fungsi pada dasarnya melekat pada institusi pers, sedang tanggungjawab melekat pada manusia pelaku profesi. Posisi institusi pers ditentukan oleh interaksinya dengan institusi lain dalam bangunan (struktur) sosial. Sedang tanggungjawab pelaku profesi bertolak dari kesadaran etis pelaku tersebut yang berdialektika dengan kondisi riil yang dihadapi oleh institusi. Dengan demikian untuk memahami soal ini dapat dimulai dari perilaku profesional pelaku pers, yang menghadirkan suatu institusi pers, di dalam suatu bangunan sosial. Atau bisa juga sebaliknya. Sehingga pembicaraan

* Orasi disampaikan pada Pembukaan Sekolah Sosial Yayasan Padi dan Kapas, Jakarta 2 Desember 1987

tentang kebebasan pers tidak terjerumus kedalam ketentuan-ketentuan normatif dengan bahasa perundang-undangan.

Posisi institusi dan profesi pers

Secara sederhana sering dirumuskan, bangunan sosial dengan sistemnya merupakan satuan kehidupan masyarakat dimana didalamnya terdapat interaksi bagian-bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian-bagian yang berinteraksi ini sebagai suatu institusi sosial ditandai oleh adanya tindakan-tindakan yang memiliki pola tertentu. Berbagai institusi sosial dalam bangunan sosial didukung oleh profesi tertentu. Profesi adalah kegiatan teknis yang berfungsi dalam kehidupan sosial, dijalankan oleh pelaku-pelaku khusus. Dengan kata lain, profesi adalah kegiatan yang hanya boleh dijalankan oleh pelaku tertentu yang diakui secara kolektif oleh sesama pelaku profesi (informal) ataupun legalitas oleh pemegang otoritas (formal).

Perilaku pelaku profesi ditentukan oleh interaksi institusi yang didukungnya dengan institusi lainnya. Dengan kata lain, bangunan sosial dimana suatu institusi berada, akan menentukan pola perilaku profesional dari para pelaku profesi. Kehendak baik yang dianut secara individual oleh pelaku profesi, akan berhadapan dengan posisi faktual institusinya dalam berinteraksi dengan institusi lainnya di dalam bangunan sosial. Sifat interaksi yang akan menentukan pola-pola perilaku itu dapat berupa determinan/dominan-submisif, atau egaliter.

Dalam masyarakat dengan sistem interaksi determinan/dominan-submisif, hubungan antar institusi bersifat konflik struktural. Setiap institusi yang berada dalam sub-sistem akan berupaya memenangkan kepentingannya. Institusi yang kuat akan mempertahankan determinasi/dominasinya dengan memaksa pihak yang lain untuk menjadi submisif, sedang yang lemah akan melakukan perlawanan terus-menerus agar tidak terkapar dalam posisi submisifnya. Sementara dalam masyarakat dengan sistem interaksi yang bersifat egaliter, hubungan antar institusi bersifat fungsional struktural. Setiap pola kegiatan dalam institusi merupakan tindakan yang bertolak dari harapan/tuntutan (expectation) dari institusi lainnya. Interaksi yang berlangsung merupakan berjalannya peran masing-masing pelaku dalam institusinya. Ukuran perilaku berdasarkan kesesuaian tindakan dengan peran yang dijalankannya dalam institusi, agar institusinya dapat fungsional dalam sistem sosial.

Setiap sistem dalam bangunan sosial berlangsung karena adanya tujuan sosial yang ingin dicapai. Adapun tujuan ini bertolak dari orientasi terhadap manusia yang melandasi seluruh bangunan sosial. Libertarianisme yang bertolak dari individualisme, misalnya, tujuan sosialnya adalah melindungi individualisme dan kebahagiaan. Biasanya kebahagiaan itu diwujudkan secara material, karenanya disebutlah kemakmuran. Untuk memelihara individualisme dan mencapai kemakmuran ini, bangunan sosial diisi oleh mekanisme yang bersifat kapitalistis. Dapat dibandingkan dengan sistem authoritarianisme yang bertolak dari kolektivisme. Juga bertujuan mencapai kemakmuran, hanya orientasi terhadap manusia berbeda, untuk itu bangunan sosial digerakkan oleh mekanisme yang disebut sistem komunis. Keduanya sama-sama bertujuan untuk kemakmuran. Apa yang membedakannya, adalah dalam orientasi terhadap manusia yang menjadi landasan seluruh bangunan sosial yang harus dipelihara segenap institusi di dalamnya.

Dengan demikian kejelasan akan orientasi yang menjadi paradigma bagi bangunan sosial akan memudahkan kita untuk mengkaji suatu sistem sosial. Katakanlah sistem sosial Pancasila, hanya dapat kita pahami melalui paradigma yang disepakati mengenai manusia. Sering dikatakan

paradigma kita adalah mono-dualisme. Artinya, orientasi individualisme sama kuatnya dengan orientasi kolektivisme. Untuk mencapai tujuan sosial, kita menganut sistem bukan kapitalis dan bukan komunis. Kalau serba bukan, lantas apa? Ya, Pancasila itu, yang sedang memproses untuk mewujudkan dalam format yang pas kelak.

Ukuran perilaku dapat pula berdasarkan pilihan pribadi, bertolak dari kesadaran pribadi untuk memilih makna hidup. Setiap orang pada dasarnya harus menjawab sejumlah pertanyaan mengenai kehadirannya dalam kehidupannya. Pertanyaan eksistensial ini membuat seseorang menjadi sadar mengapa ia hadir dalam kehidupannya, dan untuk apa kegiatan yang dijalankannya. Jawaban untuk pertanyaan eksistensial ini sedikit banyak membuat orang melakukan renungan filosofis alakadarnya, untuk mencari makna dari kehidupannya. Ada yang sampai pada kesadaran eksistensial bahwa kehidupannya untuk menjalani kewajiban yang datang dari Tuhan (asketisme). Ada yang menyimpulkan kehidupannya sebagai kewajiban untuk menjalani suatu ideologi/cita-cita sosial (idealisme). Setiap pilihan nilai hidup selalu memiliki konteks yang vertikal dan transendental (Tuhan), atau horisontal dan luas (masyarakat, bangsa). Karenanya kesadaran akan pilihan hidup benar-benar merupakan pilihan atas makna kehidupan, bukan karena dorongan-dorongan penyimpangan psikologis maupun pragmatis.

Ukuran perilaku pelaku profesi, yaitu etik, berfungsi untuk menjadi landasan bagi kegiatan teknis. Pola-pola teknis yang tidak dilandasi oleh etik mengakibatkan kegiatan yang dijalankan hanya berupa pertukangan. Etik menyebabkan suatu kegiatan yang dijalankan memiliki landasan untuk memiliki makna dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, etik menjadikan suatu kegiatan yang dijalankan pelaku profesi memiliki makna sosial.

Sebagai suatu kelompok, pelaku profesi jurnalistik pada dasarnya tidak berfungsi dalam sistem sosial. Adapun yang berfungsi adalah institusi jurnalistik/pers yang didukung oleh pelaku profesi tersebut. Karenanya harus dibedakan profesi pers dan institusi pers. Profesi pers adalah ragam kegiatan yang memiliki pola dan norma operasional yang khas. Sedangkan institusi pers berupa media yang digunakan dalam masyarakat, yang kehadirannya ditandai oleh informasi yang disebarkan secara massal. Kedaulatan Rakyat, Pertiwi, Tempo, RRI, TVRI, dan sebagainya, adalah institusi pers.

Kedudukan profesi pers ini dalam masyarakat bersifat 2 sisi. Pertama, hubungan pelaku profesi dengan orang-orang dalam masyarakat. Ini terjadi pada tahap pengumpulan informasi. Kedua, hubungan institusi pers dengan masyarakat, melalui informasi yang disampaikan. Pada tahap kedua ini, pelaku profesi sudah tidak berhubungan lagi dengan masyarakat, sebab yang dihadapi masyarakat adalah institusinya.

Kedudukan profesi pers ditentukan oleh dua hal, yaitu bagaimana pelaku profesi menyiapkan informasi, dan bagaimana informasi yang disampaikan oleh institusi pers masing-masing. Masyarakat yang disentuh oleh pelaku profesi terbatas jumlahnya, yaitu pihak-pihak yang menjadi sumber informasi. Sedangkan yang disentuh oleh institusi jauh lebih banyak, bersifat massal, yaitu khalayak pembaca (suratkabar/majalah), pendengar (radio) dan penonton (televisi). Karena muara seluruh kegiatan profesi ini adalah pada kehadiran institusi pers, maka citra sosial (social image) yang kuat terbentuk atas masing-masing institusi pers. Citra sosial yang terbentuk spesifik atas Kompas, Suara Karya, Santana, jauh lebih kuat dibanding dengan citra atas profesi yang bersifat kolektif. Hanya sekelompok kecil anggota masyarakat yang menyadari tentang eksistensi kolektivitas profesi pers.

Dikatakan tadi, hubungan langsung antara pelaku profesi pers dengan masyarakat hanya dalam hal penyiapan informasi. Setelah menjadi informasi yang didistribusikan, hubungan yang berlangsung adalah antara institusinya dengan masyarakat. Itulah sebabnya dalam sistem komunikasi dikenal konvensi adanya penanggungjawab dalam institusi. Penanggungjawab ini dalam pers Indonesia dicantumkan secara eksplisit, sebenarnya dicantumkan atau tidak, secara umum fungsi ini melekat pada pemimpin redaksi (atau wakilnya kalau ia sedang berhalangan). Sehingga kalau fungsi pemimpin redaksi dan penanggung jawab terpisah pada 2 orang yang berlainan, jadi aneh. Pemimpin redaksi mengepalai seluruh gerak redaksional, dan bertanggungjawab atas seluruh isi (*content*) berupa informasi redaksional dan informasi komersial. Jadi ia mengelola kerja redaksional untuk memperoleh informasi redaksional, tetapi bertanggungjawab untuk seluruh isi baik informasi redaksional maupun komersial.

Pemimpin redaksi/penanggung jawab merupakan personafikasi dari institusi pers dalam masyarakat. Karenanya seluruh tanggungjawab atas informasi yang sampai kepada masyarakat berada padanya. Sebagai perwujudan dari institusi, ia harus menerima segala konsekwensi dari interaksi institusinya dengan pihak lain. Dengan beban tanggungjawab sebesar ini, maka personel redaksional dalam kapasitasnya masing-masing perlu mengetahui aturan perilaku profesi, agar dalam penyiapan informasi, sejak dini sudah diproses informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kriteria etis. Sehingga personel redaksional dituntut untuk dapat bertindak dalam menyiapkan informasi, berdasarkan kriteria teknis (layak informasi/"news-worthy" dan penampilan informasi) dan kriteria etis (layak secara sosial).

Dengan kepercayaan sepenuhnya terhadap personel redaksionalnya, seorang pemimpin redaksi siap untuk mengambil seluruh tanggungjawab atas isi yang didistribusikan institusinya. Bahkan untuk informasi yang disajikan sebagai "by-line story" oleh pihak luar, secara moral pemimpin redaksi tetap bertanggungjawab. Meskipun secara yuridis penulis "by-line story" dapat dikenai tuntutan karena delik pers, sepanjang alamat dan identitas penulisnya tidak dapat dilacak oleh pengusut, pemimpin redaksi bertanggungjawab sepenuhnya. Apalagi jika delik pers itu berasal dari informasi yang disusun oleh personel intern redaksional, seluruh akibatnya akan tertuju pada institusinya.

Adanya gugatan/tuntutan yuridis terhadap reporter atau penulis berita sebenarnya menunjukkan bahwa pers sebagai suatu institusi belum dipahami atau diakui secara luas. Atau bahkan orang pers sendiri tidak menempatkan penerbitannya sebagai satu institusi dalam bangunan sosial. Kalau pers sudah diakui sebagai suatu institusi, perlakuan atau tindakan yuridis ataupun politis atas pribadi wartawan akibat perilaku profesionalnya, tidak akan terjadi. Sebab seluruh perlakuan dari luar pada dasarnya akan tertuju pada institusi, dan setiap institusi pers dipersonafikasikan oleh pemimpin redaksi. Itulah sebabnya agar pers dapat menjadi institusi sosial dituntut adanya perilaku profesional yang standar. Sebab sekali informasi disiarkan, bukan lagi sebagai keluaran individual, melainkan institusional. Dalam kondisi semacam ini, rasa bersalah (*guilty feeling*) semakin dirasakan pentingnya. Sanksi yang diterima setiap pelanggaran profesional bersifat etis. Ini berkaitan erat dengan etik profesi yang dihayati.

Keterpisahan dari hasil kerja

Setiap profesi selamanya mengandung dua sisi, yaitu teknik dan etik. Berbicara soal teknik akan menyinggung masalah operasi-operasi untuk mencapai tujuan. Sedang etik akan membawa gugatan-gugatan mengenai konteks sosial dari profesi yang bersangkutan. Secara sederhana, etik selalu dilihat sebagai pembatas bagi teknik, menyebabkan pelaku profesi dibatasi untuk mencapai

tujuannya. Tetapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Etika juga dapat dilihat sebagai rujukan-rujukan eksistensial, untuk menjadikan suatu profesi memiliki konteks sosial. Ini penting. Sebab teknik yang tidak memiliki pembandingan etik, dapat terjerumus pada operasionalisme, meminjam istilah van Peursen, yaitu ukuran tindakan hanya dicari di dalam operasi teknik semata.

Situasi operasionalisme ini semakin dekat menghadang di masa sekarang. Salah satu ciri dalam kehidupan modern menunjukkan semakin terpisahnya manusia dengan hasil (produk) kerjanya baik barang maupun jasa. Setiap produk bersifat impersonal, manusia hanya menjadi bagian suatu organisasi kerja. Manusia pribadi tidak pernah lagi menjadi produsen. Produsen adalah organisasi. "Brand-name" merupakan indikasi bagi produk. Pertanyaan tentang siapa yang harus bertanggung-jawab atas suatu produk, sudah tidak relevan lagi. Tanggung-jawab ada pada organisasi. Siapa organisasi itu? Sekumpulan manusia yang menjalankan operasi teknik sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Pada tingkat operasi teknik dalam spesialisasi tinggi, ukuran kerja adalah dalam operasi teknik spesialisasinya. Kedirian manusia dapat dilenyapkan, sebab ia telah terperangkap dalam situasi operasionalisme yang dibentuk oleh organisasinya.

Etika hanya dapat berlangsung dalam kesadaran pribadi. Dengan kata lain, sistem tidak pernah punya etika. Hanya kesadaran pribadi manusia yang memungkinkan adanya tanggung-jawab pribadi. Etika dapat disebut sebagai pilihan ideologis yang dilakukan oleh seseorang dalam eksistensinya. Pilihan dilakukan dengan kesadaran dan tanggung-jawab pribadi, bukan karena paksaan dari luar. Sehingga etik profesi sebenarnya merupakan pilihan yang dilakukan dalam kerangka profesinya. Pertanyaannya dengan demikian, faktor-faktor apakah yang memungkinkan seorang pelaku profesi dalam melakukan pilihan tersebut dengan kesadaran pribadinya? Untuk itu dapat dilihat dalam konstelasi yang lebih luas.

Profesi merupakan kegiatan teknis yang berpola dalam institusi sosial. Setiap interaksi institusi di dalam sistem sosial akan bertolak dari kerangka perilaku yang dipolakan oleh sistem sosial itu sendiri dan dari dalam institusi akan dipolakan oleh ideologinya yang bersifat etis. Secara sederhana ideologi ini dapat dianggap sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sedikit berbau kefilsafatan tentang mengapa (hal yang mendasari eksistensi), dimana (hal yang mendasari orientasi), dan untuk apa (hal tujuan) suatu kehadiran.

Dengan demikian kita bisa melihat dua segi yang selamanya akan membentuk corak perilaku profesi. Analisis sistem sosial bertolak dari kondisi riil (faktual) interaksi setiap institusi yang ada dalam kehidupan sosial, sedang ideologi tak lain dari etos dari pengembangan setiap institusi yang ada. Jika suatu sistem sosial (faktual) sesuai dengan etos tersebut, maka ukuran-ukuran dalam penilaian perilaku tidak akan mengalami ambiguitas. Lain halnya jika antara yang faktual dan idealisme ini tidak ada kesenjangan, sehingga penilaian atas perilaku dalam interaksi sosial akan mengalami ambiguitas.

Dunia komunikasi masa modern sudah menunjukkan terpisahnya pribadi komunikator dari informasi yang menjadi produknya. Operasi teknik bidang komunikasi umumnya bersifat kolektif, membutuhkan pengorganisasian yang semakin canggih. Produk berupa informasi yang sampai ke masyarakat tidak lagi dilekati oleh ciri pribadi, tetapi dengan ciri organisasi. Di sini manusia hanya menjadi bagian dalam sistem kerja. Tuntutan untuk bertanggung-jawab secara pribadi atas produk informasi, semakin berkurang karena sudah diambil alih oleh organisasi kerjanya. Jika diingat bahwa kata kunci dalam etika profesi adalah tanggung-jawab dan konteks sosial, maka dalam kondisi ini, etika menjadi jauh dari manusia pelaku profesi.

Sebagai ilustrasi, dalam sebuah seminar untuk mengembangkan pendidikan jurnalistik pada tahun 1981, seorang yang mewakili majalah berita terkemuka di Indonesia menyatakan bahwa reporter, koresponden dan pembantu di medianya tidak perlu dibebani dengan ketentuan-ketentuan etik pers. Ia hanya perlu memberikan kerjanya yang terbaik dalam menyediakan informasi. Urusan etik pers serahkan saja pada redaksi yang akan menulis berita siap cetak. Disini rupanya diciptakan sistem kerja: reporter, koresponden dan pembantu sebagai alat untuk mengumpulkan bahan baku, berdasarkan kriteria kelayakan berita yang sifatnya teknis operasional. Sedang keluaran produk akhir ditentukan oleh redaksi (desk). Kriteria "fit to the print" hanya ada pada desk.

Sistem kerja dalam dunia komunikasi telah menyebabkan manusia kehilangan ciri pribadinya atas produknya, atau bahkan ia telah teralienasi dari produk yang dikeluarkan oleh organisasi. Hanya ada ciri organisasi. Dalam bidang pers misalnya, untuk tujuan membangun citra institusional, orientasi pemberitaan dan bahasa dalam gaya kolektif perlu diciptakan. Untuk itu redaksi harus dapat melahirkan orientasi dan bahasa jurnalistik yang khas institusinya. Risikonya pelaku profesi harus diseragamkan dalam berbahasa. Pada surat kabar harian, kedirian pribadi pelaku profesi masih dapat dimunculkan melalui artikel "by-line". Tetapi di majalah, dimana setiap tulisan diolah oleh spesialis penulis, kedirian pribadi dilenyapkan.

Akibat lebih jauh dari situasi ini adalah tanggung-jawab pribadi dapat ditiadakan, dengan menyerahkan pada birokrasi dalam organisasi. Dengan mempercayakan urusan etik ini pada birokrasi dalam organisasi kerja, pelaku profesi memang dapat sepenuhnya berkonsentrasi dalam aspek teknik dalam profesinya. Hasil kerjanya dalam kerangka manajemen dapat maksimal. Apalagi jika etos yang mendasari manajemen organisasi adalah mengejar profit sesuai dengan hukum ekonomi, kriteria dalam perilaku profesional akan semakin jauh dari konteks sosial.

Semangat pers kita

Setelah berpanjang lebar membicarakan profesi dan institusi pers secara umum, ada baiknya meninjau kehidupan pers di negeri kita. Dalam sejarah pers di Indonesia, dikenal istilah pers nasional. Ini untuk membedakan dengan pers kolonial dan pers komersial. Masing-masing institusi pers ini memiliki orientasi yang berbeda-beda. Pers nasional atau pers perjuangan tumbuh dan digerakkan untuk mission menentang penjajah, sedang pers kolonial untuk membela dan memelihara establisment Hindia Belanda, dan pers komersial yang umumnya dikelola oleh kaum Tionghoa semata-mata menjual informasi. Posisi ketiga macam institusi ini diperbedakan dari orientasinya terhadap cita-cita kemerdekaan.

Pers nasional tersebut didirikan tidak dengan orientasi untuk menjual informasi, tetapi untuk mendidik masyarakat ke arah sikap merdeka. Karenanya para wartawannya tidak bisa diukur dengan profesionalisme jurnalistik seperti yang dikenal sekarang. Wartawan merangkap pejuang. Karenanya setiap orang yang memilih bergiat (bukan bekerja/menjadi sebagai profesi) dalam pers nasional, siap buat menerima konsekuensi diperlakukan sebagai kaum yang tersisih dari struktur kolonial.

Dalam pers nasional tidak pernah dipersoalkan profesionalisme. Para wartawan tidak bekerja dalam standar jurnalistik, tetapi dengan standar ideologi perjuangan anti kolonial. Karenanya pula aktivitas jurnalistik tidak diandalkan sebagai sumber kehidupan. Rekrutmen wartawan berlangsung dalam mekanisme perjuangan, bukan dalam pola-pola manajemen yang canggih seperti yang dikenal sekarang.

Kategorisasi diatas tentunya sudah tidak berlaku lagi setelah kemerdekaan. Kita loncati saja periode masa revolusi, liberal, dan demokrasi terpimpin. Ini merupakan cerita panjang dalam sejarah pers Indonesia, tak mungkin dibicarakan disini. Sekarang, pada zaman Orde Baru ini kita hanya mengenal pers Pancasila. Bagaimana kita memperbedakan orientasi masing-masing pers? Dalam kesamaan asas, tentunya kita tetap perlu menangkap nuansa perbedaan satu sama lain.

Kriteria dalam meninjau orientasi pers yang ada sekarang dalam konteks sejarah, tentunya dengan menarik garis pada pers nasional pada masa penjajahan. Perjuangan sekarang tidak lagi untuk menentang penjajahan, tetapi demi pembangunan. Eksistensi pers pembangunan, selain ditentukan oleh SIUPP, juga oleh kemampuannya menjual informasi dan menyewakan halaman untuk iklan. Secara yuridis hak hidupnya ditentukan oleh pemberi SIUPP, tetapi secara faktual ditentukan oleh masyarakat di luar pemerintah (pembaca dan pemasang iklan).

Pembedaan satu institusi pers dengan lainnya tidak dapat ditarik dari orientasinya. Semua institusi pers satu asas Pancasila, dan sama orientasi yaitu pembangunan. Kalaupun harus dicari perbedaannya, adalah dalam teknik penyajian. Meskipun banyak institusi pers, tetapi kesemuanya merebut pasar yang sama, karena citra produknya sulit dibedakan. Akibatnya persaingan hanya dapat dilakukan dengan manipulasi fisik dengan tipografis dan ketebalan halaman, atau bahkan dengan menjual impian melalui sayembara dan undian berhadiah besar.

Dalam persaingan antar institusi pers, informasi sebagai komoditi terbatas dimensi yang dapat disajikan. Akibatnya pengelola institusi pers lebih banyak berkutatan dalam proses produksinya. Dari sisi ini, institusi pers di Indonesia dapat dipandang sudah menjadi industri. Berkutatan dalam manajemen produksi dan kontrol kualitas atas komoditi berupa informasi atas dasar prinsip-prinsip manajemen. Maka personel yang terlibat dalam penyiapan produksi semakin dituntut untuk menjadi lebih profesional.

Profesionalisme dapat dilihat dalam dua aspek. Pertama dalam konteks teknis operasional, dan kedua dalam konteks etik profesi. Proses rekrutmen dalam dunia pers sekarang lebih banyak ditentukan dengan aspek yang pertama, sesuai dengan tuntutan manajemen produksi. Sedang aspek yang kedua semakin tersingkir. Ini sangat berbeda dengan pola pers perjuangan pada masa pra-kemerdekaan.

Orientasi yang bersifat industrial ini berkaitan erat dengan perkembangan bangunan sosial di Indonesia. Kekuatan ekonomi mulai menggeliat untuk mengambil tempat, sementara kekuatan politik di luar pemerintah tidak nampak tanda-tanda menguatnya. Hal ini menyebabkan industri pers semakin gampang untuk masuk menjadi bagian sub-sistem ekonomi, makin menjauh dari sub-sistem politik. Kesadaran untuk ambil bagian dalam sub-sistem politik semakin hilang. Bukan hanya karena faktor-faktor obyektif eksternal, tetapi juga bersifat internal karena semakin terputusnya tradisi pers perjuangan di kalangan pengelola industri pers.

Umumnya personel jurnalistik dalam industri pers yang direkrut adalah lulusan perguruan tinggi yang tidak belajar secara khusus jurnalisme. Tenaga-tenaga baru ini memang potensial, sebab cerdas, punya motivasi dan agresivitas sebagaimana umumnya anak muda urban. Potensi semacam ini sangat sesuai untuk manajemen industrial modern. Meskipun belum trampil dalam teknis jurnalisme, lebih mudah untuk dilatih dalam kerangka manajemen: input-proses-output. Industri pers dapat memperoleh personel yang dapat bekerja menyiapkan komoditi dalam iklim persaingan yang semakin ketat.

Tetapi ada hal yang hilang, yaitu kesadaran kesejarahan tentang eksistensi pers nasional. Makin lama pengelola pers yang pernah hidup dalam era pers perjuangan semakin langka. Sisa-sisanya hanya orang semacam Rosihan Anwar, BM Diah, Mochtar Lubis, meskipun masing-masing belum tentu cocok satu sama lain, membawa tradisi jurnalistik perjuangan tersebut.

Tradisi atau kesadaran kesejarahan ini semakin lama kian jauh. Sedang yang makin nampak adalah semakin berkembangnya sistem industrial dalam pers Indonesia. Sekarang institusi pers tidak dimulai dengan kelompok manusia dengan kesamaan idealisme sosial, tetapi bermula dari kekuatan modal. Kekuatan modal kemudian merekrut personel jurnalistik.

Dimana tulang punggung pers kita?

Sistem rekrutmen dalam profesi pers boleh dikatakan tidak ditunjang oleh dunia pendidikan. Dari kualifikasi yang dituntut pada setiap rekrutmen, nampaknya semuanya sudah sepakat bahwa tenaga profesional bidang pers adalah lulusan perguruan tinggi. Tapi sayangnya kebutuhan institusi pers ini tidak didukung oleh pendidikan tinggi di Indonesia.

Pendidikan tinggi yang mengajar dan memperkembangkan praktek-praktek dalam bidang pers, boleh dikatakan tidak ada. Terutama sejak institusi pendidikan tinggi diubah dalam 2 kutub, yaitu S1 yang berorientasi teoritis akademik, dan program D yang berorientasi praktek profesi, khusus untuk profesi pers tidak ada perguruan tinggi negeri yang menyediakan program D. Bahkan sejumlah perguruan swasta yang pernah menyelenggarakan pendidikan setingkat sarjana muda dan berorientasi praktek profesi, kebanyakan ikut-ikutan mengubah diri meniru program S1.

Karenanya tenaga untuk profesi pers/media massa tidak pernah disiapkan secara khusus oleh perguruan tinggi, tidak juga oleh perguruan yang mengajarkan Ilmu Komunikasi. Program S1 perguruan tinggi yang mengajarkan Ilmu Komunikasi pada dasarnya diharapkan menyiapkan tenaga yang menguasai metodologi dan teori-teori Ilmu Komunikasi secara khusus, dan teori-teori Ilmu Sosial lainnya sebagai pelengkap bagi pendekatan interdisipliner. Padahal dunia pers sebagai institusi yang ditopang oleh profesi jurnalisme (dan bisnis) hanya dapat berlangsung jika disuplai oleh masyarakat dengan personel yang handal. Dengan kata lain, sebelum diserap oleh institusi pers, di dalam masyarakat diharapkan sudah ada proses untuk menyiapkan tenaga-tenaga tersebut.

Jika pendidikan formal memang tidak secara khusus menyiapkan generasi muda untuk terjun ke lapangan pers, dengan sendirinya proses ini akan berlangsung secara informal. Sampai saat ini lapangan jurnalistik merupakan profesi terbuka. Karena terbukanya ini, sehingga ada yang menganggap belum layak disebut sebagai suatu profesi. Berbeda dengan dokter, pendeta/pastor, notaris, dan diberbagai negara juga advokat, yang untuk dapat sebagai tenaga profesional harus menempuh pendidikan khusus. Kalau dibuka kamus-kamus bahasa Inggris, arti profesi selamanya dikaitkan dengan pendidikan khas yang mendasarinya.

Sebagai profesi yang terbuka, institusi pers menerima tenaga dari berbagai sumber. Pendidikan tinggi misalnya, meskipun tidak secara khusus menyiapkan tenaga untuk institusi pers, menyumbangkan lulusannya untuk mengisi dunia pers. Biasanya masing-masing institusi melatih para lulusan perguruan tinggi ini untuk dapat berkegiatan profesional. Mayoritas tenaga profesional pers saat ini di Indonesia berasal dari perguruan tinggi yang tidak mengajarkan Ilmu Komunikasi, lebih-lebih Pers/Jurnalisme. Ada pendidik di perguruan tinggi non jurnalisme yang senang jika anak didiknya menjadi wartawan. Tetapi ada juga sebaliknya.

Mengenai wartawan yang berasal dari perguruan tinggi non jurnanisme ini, ada anekdot pers yang menarik menyangkut Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Menlu RI. Dalam salah satu pertemuan dengan pers, seorang wartawan dengan bangga menyatakan bahwa ia dulu anak didik (maksudnya mahasiswa) Dr. Mochtar. Tapi apa jawab Dr. Mochtar? "Saya tidak pernah mendidik wartawan!"

Guru besar yang bangga dengan ilmunya tentu akan lebih bangga jika anak didiknya menguasai ilmu yang diajarkannya. Bahwa Ilmu Hukum Internasional juga ada gunanya dalam praktek jurnalistik sepanjang si wartawan tidak ditempatkan sebagai wartawan olahraga, nampaknya kurang membanggakan Dr. Mochtar.

Kegiatan pers mahasiswa yang diikuti oleh mahasiswa selama di perguruan tinggi, juga dapat dipandang sebagai bagian proses yang berlangsung dalam masyarakat secara khusus untuk menopang profesi jurnalistik. Jika kurikulum pendidikan formalnya tidak ada kaitannya dengan kegiatan jurnalistik, tetapi dengan menjadikan kegiatan pers mahasiswa sebagai ko-kurikuler dalam kegiatan belajar-mengajar, setidaknya-tidaknya dunia pers ada harapan memperoleh tunas-tunas baru. Cuma sayangnya, tidak semua pimpinan perguruan tinggi menjadikan kegiatan pers mahasiswa sebagai bagian ko-kurikuler, bahkan banyak yang alergi terhadapnya. Mereka lebih suka hanya menjadikan olahraga dan kesenian (tertentu) sebagai ko-kurikuler di perguruan tingginya.

Di dalam masyarakat, melalui berbagai lembaga pendidikan non-formal, ada juga pendidikan atau latihan yang mempersiapkan tenaga trampil untuk profesi pers. Kelihatannya lembaga-lembaga pendidikan ini kurang berkembang, karena institusi pers biasanya mempersyaratkan ijazah dengan pendidikan formal, dalam hal ini sarjana/sarjana muda. Mungkin keberadaan lembaga-lembaga pendidikan non-formal ini baru lebih terasa jika yang dididiknya para lulusan perguruan tinggi. Dengan demikian sebagian beban institusi pers yang selama ini harus melatih (in-house training) para calon personelnya, dapat dikurangi. Sehingga benar-benar memperoleh tenaga siap pakai dan siap mandiri.

Tetapi posisi yang melengkapi lulusan perguruan tinggi semacam ini, sebenarnya tidak layak dikerjakan oleh lembaga non-formal yang umumnya merupakan organisasi swadaya masyarakat. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan formal, dengan biaya yang mahal itu, seharusnya sejak awal sudah mempersiapkan anak didiknya untuk siap pakai dan siap mandiri. Kalau anak didiknya tidak siap pakai dan siap mandiri, sebaiknya anggarannya dikurangi saja, kalau bisa disalurkan kepada bagian-bagian pendidikan perusahaan yang selama ini masih harus melatih calon personelnya, atau Departemen Tenaga Kerja yang disibuki penyiapan tenaga siapa pakai dan mandiri. Sedang lembaga-lembaga pendidikan non-formal selayaknya menolong generasi muda yang terlempar atau tak bisa terserap ke dalam pendidikan formal yang terbatas dan mahal itu.

Hanya masalahnya, institusi pers kita masih ikut terpaku pada status formal dari lulusan perguruan tinggi. Dengan menjadikan ijazah kesarjanaan lengkap/muda sebagai persyaratan, dengan sendirinya menutup kemungkinan bagi generasi muda yang kapasitas pribadinya sebenarnya layak untuk digunakan dalam profesi jurnalistik.

Memang benar, kapasitas seorang sarjana diperlukan untuk menjalankan tugas jurnalistik. Seorang sarjana adalah seorang ahli yang menguasai ilmu pengetahuan. Penguasaannya akan menyebabkan ia mampu mandiri. Tetapi jika ijazah belum mencerminkan kemandirian dalam menguasai ilmu pengetahuan, seharusnya kapasitas pribadi lebih diutamakan.

Agar masyarakat tidak terpaku pada ijazah dan gelar-gelar, perlu tumbuh mekanisme yang memungkinkan kapasitas pribadi berkembang dalam masyarakat. Peran dalam masyarakat pada

dasarnya ditentukan oleh kapasitas pribadi. Hanya kecenderungan formalisme kita saja yang menyebabkan orang terlalu terpaku pada status formal kesarjanaan. Dan kecenderungan inilah yang telah membuat dunia pendidikan kita hanya sibuk menelurkan sarjana bergelar, sedikit saja sarjana non-gelar. Padahal masyarakat hanya menginginkan sarjana (orang yang berilmu pengetahuan), tak soal ia bergelar atau tidak, atau bahkan tidak pernah melalui pendidikan tinggi formal. Tapi sayang dunia pendidikan tinggi hanya sibuk mencetak sarjana bergelar bahkan dengan strata yang dakik-dakik.

Kapasitas pribadi macam apa yang perlu dikembangkan oleh seorang wartawan jika ingin terjun ke dunia pers? Pertama yang harus disadari, bahwa profesi jurnalistik merupakan kerja intelektual. Disebut intelektual sebab berkaitan dengan informasi dan alam pikiran. Informasi berasal dari masyarakat, dan disampaikan ke dalam alam pikiran anggota masyarakat. Untuk bisa memperoleh informasi, seseorang harus memiliki kepekaan dan kritisisme sosial. Selanjutnya baru ia mengolah informasi itu dalam kaidah-kaidah teknis dan etis, untuk nantinya disampaikan melalui medianya. Dan informasi itu akan menyusup ke dalam alam pikiran khalayaknya.

Dari sini dapat dibayangkan bagaimana beratnya pelaku profesi ini. Bandingkan saja dengan dosen perguruan tinggi. Seorang dosen hanya menyampaikan informasi yang berasal dari referensi yang sudah baku, diolahnya (sering tidak dengan trampil sehingga membosankan) atau bahkan tidak diolah sama sekali, baru kemudian disampaikan pada sekelompok orang yang jumlahnya terbatas, yang memang berniat untuk mendengar (sebab sudah membayar SPP) dalam kelas-kelas yang dirancang dengan berbagai fasilitas. Sedang pelaku profesi pers, harus mencari sendiri informasi itu dari masyarakat, kemudian mengolahnya sedemikian rupa agar menarik (kalau tidak, medianya tidak dibeli), sehingga informasinya dapat disampaikan pada orang yang tidak terbatas.

Khalayak media-massa bersifat heterogen. Tingkat intelegensianya juga bermacam-macam. Dalam menghadapi heterogenitas inilah pelaku profesi media-massa bekerja. Karena yang disampaikannya berupa informasi, ia harus berada selangkah di depan dibanding dengan khalayak medianya. Intelegensia dari pelaku profesi akan tercermin dalam informasi yang disampaikan oleh institusi media yang sampai pada masyarakat. Seorang pelaku profesi jurnalistik tidak mungkin dan tidak perlu menyamai orang yang punya intelegensi tinggi yang ada dalam masyarakat. Yang penting adalah ia tahu informasi macam apa yang diperlukan oleh orang dengan intelegensi yang tinggi itu, dan tahu pula dari mana ia bisa memperoleh informasi tersebut. Dengan kata lain, berada selangkah di depan berarti dapat menjadi mediator yang tepat. Seorang wartawan tidak perlu menjadi doktor, karena tugasnya adalah menjadi mediator dari para doktor atau orang yang intelegensinya tinggi dalam masyarakatnya. Seorang wartawan tidak menuliskan apa yang ada dalam kepalanya, tetapi menyampaikan apa yang terjadi dalam kehidupan dan alam pikiran orang lain.

Sebagai mediator, pekerja pers memiliki fungsi yang strategis. Informasi yang disampaikannya bukan hanya sekadar komoditi, tetapi juga memiliki makna sosial. Setiap informasi berasal dari masyarakat, baik realitas sosiologis maupun realitas psikologis. Informasi yang bersifat sosiologis berasal dari perilaku obyektif yang terjadi dalam interaksi sosial, sedang yang bersifat psikologis berasal dari dunia subyektif dalam alam pikiran manusia. Kedua sifat informasi ini harus dicari dan diolah oleh seorang wartawan. Masing-masing informasi ini memiliki karakteristik yang berbeda, yang menyebabkan wartawan harus memperkembangkan kapasitas yang sesuai.

Dalam mencari realitas yang berasal dari masyarakat, dengan sendirinya seorang wartawan memerlukan kapasitas seorang intelektual. Yaitu memiliki kepekaan dan visi sosial, dan mampu memformulasikan secara sosial tangkapannya atas realitas. Kepekaan sosial adalah kapasitas diri

untuk menerima tanda yang berasal dari kehidupan sosial, sehingga dapat menyerap fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Sedang visi sosial adalah adanya referensi yang dapat digunakan sebagai perbandingan dalam menghadapi fenomena. Disini realitas sudah diangkat ke tingkat fenomena, yaitu hal yang memiliki makna (meaning) atau nilai (value). Hanya realitas yang memiliki makna atau nilai sajalah yang perlu diformulasikan, diolah sebagai informasi yang akan disampaikan melalui media.

Kriteria makna atau nilai dapat ditinjau secara intrinsik dan ekstrinsik. Disebut makna atau nilai intrinsik jika terdapat didalam realitas itu sendiri, sedang yang bersifat ekstrinsik merupakan makna atau nilai dilekatkan atas fungsi yang berasal dari luar realitas itu. Pilihan atas realitas yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kriteria makna atau nilai yang diterapkan oleh seorang wartawan.

Ketrampilan jurnalisme hanyalah berupa pertukangan mengolah dan menyajikan informasi. Tapi bagaimana menemukan dan menyeleksi realitas untuk diangkat sebagai informasi, akan menentukan kelas pertukangan yang dijalankan oleh pelaku profesi pers. Tukang juga diperlukan, namun intelektualisme akan mengubah pertukangan sebagai pekerjaan dengan nilai lebih bagi kebudayaan.

Informasi yang kian langka

Kapasitas pelaku profesi pers diperkembangkan untuk mencari dan mengolah informasi. Informasi diangkat dari realitas kehidupan masyarakat. Pilihan-pilihan realitas terjadi atas dasar intelektualisme yang ada pada diri si pelaku. Namun seluruh kapasitas itu tidak akan ada artinya jika realitas yang tersedia memang terbatas. Mungkin jadi aneh kedengarannya. Apakah mungkin realitas bisa menjadi langka? Lantas apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat?

Pengelola institusi pers tentunya dapat lebih banyak berbicara tentang kendala pencarian dan pengolahan realitas ini. Tetapi kita cukup berbicara berdasarkan kesan yang timbul dengan mengamati isi sajian pers kita. Ini antara lain kesan itu:

Pernahkah anda memperhatikan betapa pentingnya pernyataan (statement) pejabat birokrasi bagi pers kita? Pernyataan-pernyataan ini seolah mendapat hak istimewa untuk menempati halaman depan surat kabar-surat kabar kita. Memuat pernyataan yang mengandung nilai berita di halaman depan memang perlu dilakukan. Tetapi kalau suatu realitas sosiologis harus melalui mulut pejabat lebih dulu baru bisa disiarkan, menunjukkan bahwa pers semakin tidak sanggup mencari dan mengolah realitas sosiologis dalam kapasitasnya yang mandiri. Kepercayaan pada dirinya sendiri sebagai suatu institusi dalam bangunan sosial, sudah semakin hilang. Dengan kata lain, jika pers hanya berani menampilkan realitas sosiologis melalui realitas psikologis para pejabat birokrasi, itu menandakan pers kita sebenarnya mengidap kompleks rendah diri (inferiority complex). Kalau institusi yang menjadi andalan untuk demokrasi itu sudah begini, sulitlah membayangkan proses terbentuknya masyarakat yang egaliter.

Selain itu, pers kita banyak yang berkecenderungan menjadikan realitas psikologis (opini) tokoh-tokoh masyarakat sebagai "banner headline". Bahkan kalau perlu menciptakan forum seminar agar para pakar dapat bersilang pendapat satu sama lain, untuk kemudian diangkat sebagai berita pers. Kebanyakan wawancara dilakukan bukan untuk merekonstruksi realitas sosiologis, tetapi hanya untuk memperoleh realitas psikologis tokoh berupa komentar mengenai realitas sosiologis.

Biasanya realitas sosiologis ini sesungguhnya tidak dapat dicermati secara tajam, dan pers hanya

mengandalkan otoritas para pakar tersebut. Dengan kata lain, isi pers lebih banyak berupa realitas psikologis. Kalau pun ada disinggung suatu realitas sosiologis, ditampilkan melalui realitas psikologis para pakar yang umumnya warga akademika.

Majalah-majalah wanita bertumbuh, dengan mengandalkan informasi berupa realitas internal rumah tangga. Informasi model kisah sejati dan pengakuan-pengakuan pribadi atau yang bersifat hubungan antar pribadi dan rumah tangga, meramaikan halaman-halaman majalah ini. Hanya sedikit yang keluar dari pola ini. Sekali-sekali memang ada majalah wanita yang mengungkapkan realitas sosiologis dari kehidupan masyarakat. Tetapi kecenderungan umum tetap mengeksploitasi realitas internal hubungan antar pribadi. Atau dengan mengandalkan realitas psikologis dari tokoh-tokoh masyarakat, dengan wawancara yang biasanya disajikan secara tanya jawab langsung. Informasi dari wawancara ini biasanya menyangkut realitas internal pribadi tokoh, maupun realitas psikologisnya dalam mengomentari realitas sosiologis.

Kalaupun pers kita sangat serius untuk menggarap realitas sosiologis, adalah yang berlangsung di luar negeri. Halaman depan dan "banner headline" dengan sangat royal digunakan untuk menyampaikan informasi luar negeri. Apa yang terjadi di Malacanang atau Gedung Putih, sedemikian mendapat perhatian pers kita, tak bisa dibandingkan dengan perhatian terhadap penduduk Kedung Ombo yang lari ke hutan, misalnya.

Masih ada yang lainnya mendapat perhatian serius dari pers kita, yaitu realitas tontonan, berupa peristiwa-peristiwa olahraga. Semua orang sepakat, olahraga itu penting bagi kesehatan. Semboyan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, perlu didukung sepenuh hati dan segiat badan. Tetapi kalau realitas tontonan dianggap lebih penting dari realitas sosiologis yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, tentunya akan jadi lain perkaranya.

Dari seluruh kesan yang baur ini, setidaknya-tidaknya timbul sejumlah pertanyaan: apakah realitas sosiologis dalam kehidupan masyarakat kita sudah sedemikian sulitnya diperoleh? Ataukah khalayak media kita sudah sedemikian tidak tertariknya pada realitas sosiologis di lingkungan bangsanya sendiri? Ataukah pers kita memang bersengaja punya strategi sendiri dalam memilih realitas ini? Ataukah ada rekayasa sosial yang sudah berlangsung sekian lama yang menyebabkan kecenderungan pers dan kecenderungan khalayak terbentuk sebagaimana sekarang?

Kecenderungan untuk mengabaikan realitas sosiologis untuk berasyik-asyik masuk ke dalam realitas psikologis, dengan sendirinya ada mudaratnya. Pada titik ekstrim dari kecenderungan ini adalah lari ke dunia kebatinan. Spiritualisme yang menjadi penyeimbang kehidupan dengan orientasi materialisme, sangat kita perlukan. Fungsinya adalah untuk mengisi realitas psikologis kita agar kita memiliki stabilitas untuk menghadapi orientasi materialisme yang tak kenal batas kepuasan. Tetapi yang berkembang bukan sekadar spiritualisme, melainkan paranormal yang menjadi semacam "teknologi" buat mengatasi masalah dalam kehidupan. Upaya untuk membangun suatu kebudayaan yang bertolak dari ilmu dan teknologi, yang dapat menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa lain, kiranya akan menjadi jauh dari jangkauan kita.

Indikasi yang menarik adalah berkembangnya eufimisme yang tidak lagi sekadar untuk menjaga rasa santun melalui bahasa dalam kehidupan masyarakat. Eufimisme lebih banyak bertolak dari ketakutan akan faktor-faktor eksternal, dan digunakan sudah dalam taraf untuk tidak ingin melihat realitas sosiologis. Jika disadari bahwa setiap kebudayaan pada dasarnya diproses dari rangkaian dinamika realitas sosiologis, dengan kecenderungan yang berlangsung sekian lama, tentulah ada yang hilang dari perikehidupan kita kelak. Kebudayaan merupakan suatu proses dan hasil proses itu

sendiri. Apa yang sedang mengarus sekarang, merupakan bagian sekaligus landasan untuk kebudayaan masa depan.

Rekayasa sosial tetap diperlukan untuk membangun suatu format kebudayaan yang ideal. Tetapi mungkin saja rekayasa ini hanya sekadar untuk menjaga stabilitas untuk menopang suatu kekuasaan, yang lebih lanjut untuk tujuan pragmatis mencapai tingkat kemakmuran secara makro. Meskipun kemakmuran itu sudah disertai keadilan, masih ada yang kita kejar. Kalau hanya kemakmuran plus keadilan yang terjadi, agaknya terlupakan bahwa dalam perjalanan kita berbangsa, yang tak kalah pentingnya adalah membangun manusia, baik secara mikro (manusia seutuhnya) maupun secara makro (bangsa). Ini bahasa lain untuk menyebut membangun format kebudayaan yang sesuai untuk menghadapi masa depan, setelah tinggal landas, setelah kita semua yang ada di ruangan ini selesai dalam peran kita masing-masing di dunia ini.

Penutup

Pers kita bersengaja atau tidak, bisa ikut menjadi alat dalam perekayasaan sosial ini. Dalam melihat kehadiran pers, kita bisa saja bersimpati akan segala kendala yang mungkin dihadapinya. Tetapi yang paling perlu diwaspadai adalah kemungkinan untuk terjerumusnya pers kita dalam kehadiran yang dilandasi oleh operasionalisme. Karenanya dalam melihat masalah kebebasan pers ini, yang paling penting agaknya adalah untuk menangkap arus jaman. Mewaspadai perekayasaan sosial yang terjadi, menyimak kecenderungan yang ada, serta mempertanyakan bagaimana posisi pers kita dalam arus tersebut.

Dengan bertumbuh sebagai suatu industri, institusi pers yang mengisi sistem komunikasi dalam bangunan sosial kita, semakin jauh dari perannya sebagai bagian dalam sub-sistem politik, sebab hanya menjadi bagian dalam sub-sistem ekonomi. Akibatnya, pers kita semakin kehilangan pula peran tradisionalnya untuk ikut sebagai variabel dalam sistem politik. Lebih jauh, pers kita tidak bisa berperan dalam politik kebudayaan yang sangat vital dalam membangun masyarakat masa depan kita. Sementara politik kebudayaan yang berlangsung digerakkan dengan orientasi pada stabilitas kekuasaan. Maka proses kebudayaan kita menjadi mandeg. Sehingga layak dipertanyakan, dimana pers berada dalam perjalanan kebudayaan kita?

Itulah, disini saya hanya mencoba mengkonstatasi berbagai hal, untuk mengajak sekali-sekali kita keluar dari operasi teknis yang sudah kita lakukan dengan serba canggih itu. Persetankan segala sukses manajemen yang telah membangun pers sebagai suatu industri itu. Tai kerbaukan sukses ekonomi dan fisik industri pers yang sudah diraih itu. Pertanyakan, mungkin kita ikut dalam arus jaman, dengan dalih yang sangat pragmatis!